

KRISIS GLOBAL PANGAN-ENERGI-FINANSIAL : DAMPAK DAN RESPON KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

Food-Fuel-Financial Global Crisis: Impact and Policy Response on Security and Poverty Alleviation

I Wayan Rusastra, Handewi P. Saliem, dan Ashari

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jalan A. Yani 70 Bogor 16161*

ABSTRACT

The policy effectiveness of food security enhancement and poverty alleviation will be determined by better understanding and adaptation of the global impact and policy response of food-fuel-financial (Triple F) crisis at national level. The analysis is based on the global impact and response of the respective crisis at regional level especially in developing countries, with the ultimate objective to strengthen food security and accelerate poverty alleviation in Indonesia. The main output of the study are (a) Triple F crisis generate negative impact on global agricultural investment, food production, and food price stability; (b) At macro level in Indonesia, there is no impact of crisis on the production, availability, and consumption of main staple food, (c) Based on the decreasing rate of poverty of 2.20 percent per year (2000-2009), the poverty rate in 2015 estimated at 12.3 percent, a figure that far above the target of MDG 2015 of 7.2 percent; (d) Implicitly, the respective crisis generate negative impact on the availability and access to food for the household, indicated by the existence of food insecurity and decreasing rate and achievement of poverty alleviation as a target in 2015. Future policy direction of national agricultural development should be directed to smallholder agricultural development with a perspective of growth and equity, by considering three policy options: (a) The enhancement of macro economic stability and the increasing of budget allocated to agricultural and rural infrastructure development; (b) Demand driven agricultural development, complemented with the improvement of marketing system and marketing efficiency; (c) The development of institutional innovation and incentive system to support the availability and access input factors and services for the benefit of small scale farmers.

Key words: *food-fuel-financial crisis, food security, poverty*

ABSTRAK

Efektivitas kebijakan pemantapan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan ditentukan oleh pemahaman dan adaptasi dampak dan kebijakan global krisis pangan-energi-finansial (PEF). Analisis didasarkan atas dampak global krisis PEF dan respons kebijakan regional, khususnya di negara berkembang dengan sasaran pemantapan perumusan kebijakan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Temuan pokok kajian adalah (a) Krisis PEF berdampak terhadap

ketersediaan investasi pertanian global, penurunan produksi, dan peningkatan volatilitas harga pangan; (b) Pada tataran makro di tingkat nasional, krisis tidak berpengaruh terhadap produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan utama; (c) Mengacu pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 2,2 persen (2000-2009), tingkat kemiskinan relatif 2015 mencapai 12,3 persen, jauh di atas target MDG tahun 2015 sebesar 7,2 persen, (d) Secara implisit, krisis PEF berpengaruh terhadap ketersediaan dan akses pangan ditingkat rumah tangga, yang di indikasikan oleh perlambatan laju dan pencapaian target pengentasan kemiskinan 2015. Antisipasi kebijakan ke depan, pembangunan pertanian nasional perlu diarahkan pada pengembangan pertanian skala kecil dalam perspektif pertumbuhan dan pemerataan dengan mempertimbangkan tiga opsi kebijakan berikut: (a) Pemantapan stabilitas makro ekonomi dan peningkatan anggaran pembangunan pertanian dan pengembangan infrastruktur perdesaan, (b) Pengembangan produksi berbasis potensi pasar yang dikomplemen dengan perbaikan sistem dan efisiensi pemasaran produk pertanian, dan (c) Pengembangan inovasi kelembagaan dan sistem insentif dalam mendukung ketersediaan dan akses sarana produksi dan jasa pelayanan usahatani skala kecil.

Kata kunci: *krisis pangan-energi- finansial, ketahanan pangan, kemiskinan*

PENDAHULUAN

Terdapat keterkaitan antara krisis pangan, energi dan finansial. Krisis pangan diawali oleh krisis energi (kenaikan harga minyak dan pengembangan bioenergi) yang memicu kelangkaan pangan dan kenaikan harga pangan. Penurunan harga minyak dan krisis finansial yang diikuti dengan penurunan pertumbuhan ekonomi global telah mendorong penurunan harga pangan, sehingga memunculkan fenomena baru yaitu krisis harga pangan. Krisis pangan dan finansial secara simultan berdampak terhadap ketahanan pangan, ketahanan politik, dan stabilitas finansial/ekonomi nasional dan kawasan. Dalam konteks krisis saat ini, sedikitnya dibutuhkan tiga elemen program aksi yang bersifat komplemen, yaitu promosi pertumbuhan pertanian pro-kemiskinan, penurunan volatilitas harga pangan, dan perluasan jaring pengaman sosial bagi kelompok miskin (Von Braun, 2008)

Selama periode 2007 - pertengahan 2008, harga pangan meningkat tajam. Pada kuartal kedua 2008, harga internasional gandum dan jagung mencapai puncak tertinggi, yaitu tiga kali lebih tinggi dari harga 2003, dan lima kali lebih tinggi untuk beras. Peningkatan harga ini diantaranya berdampak serius terhadap ketahanan pangan dan kemiskinan regional dan global. Penurunan harga pangan dalam beberapa bulan terakhir ini sebagai akibat penurunan harga minyak dan krisis finansial, ternyata tetap di luar kapasitas dan akses penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Krisis finansial pada akhirnya memberi dampak serius terhadap ketersediaan dan kebutuhan dana investasi untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan pertanian, khususnya di negara

berkembang. Petani di negara berkembang, saat ini dihadapkan pada kenyataan penurunan harga komoditas, dengan konsekuensi penurunan pendapatan dan keberlanjutan usahatani.

Respon negara maju dan negara yang memiliki surplus pangan terhadap krisis pangan-energi-finansial dinilai reaktif dan tidak kondusif bagi pembangunan pertanian dan perdesaan (CIGAR, 2008; Von Braun, 2008; Napitupulu, 2008), sebagai berikut: (a) Pengembangan bioenergi yang tidak dikaitkan dengan pembangunan pertanian dan perdesaan, dinilai kontra produktif dengan upaya peningkatan ketahanan pangan; (b) Tindakan spekulatif melalui peningkatan cadangan pangan di luar batas kewajaran, dengan antisipasi tetap menjaga stabilitas harga pangan, berdampak buruk terhadap ketersediaan dan harga pangan di negara defisit pangan; (c) Krisis finansial dengan konsekuensi krisis ekonomi, khususnya di negara maju, dikhawatirkan akan diikuti oleh penurunan bantuan pembangunan luar negeri serta bantuan teknis dan manajemen terhadap pembangunan pertanian dan perdesaan bagi negara berkembang.

Permasalahan spesifik yang dihadapi Indonesia, yang menjadi fokus dari analisis ini, terkait dengan krisis pangan-energi-finansial adalah: (a) Kurangnya sinergi kebijakan nasional dengan kebijakan regional dan global; (b) Eksklusivitas kebijakan dalam suatu negara, akan berdampak terhadap kapasitas, efektifitas, dan kontinuitas dari kebijakan tersebut; (c) Ketahanan pangan dan kemiskinan bersifat inklusif dan merupakan komitmen global-universal, dimana Indonesia terikat dengan ratifikasi MDG (Millenium Development Goal) dan pencapaian sarannya pada 2015; (d) Krisis pangan-energi-finansial memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap pemantapan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan yang menjadi salah satu sasaran dan tujuan strategis pembangunan pertanian dan nasional.

Tujuan analisis kebijakan ini adalah (1) Mengidentifikasi krisis pangan-energi finansial regional/global dan dampaknya terhadap ketahanan pangan dan kemiskinan; (2) Menganalisis respons kebijakan regional/global dalam upaya pemantapan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan; (3) Menganalisis dampak krisis pangan-energi-finansial terhadap kinerja ketahanan pangan nasional; (4) Menganalisis pencapaian target pengentasan kemiskinan dan kelaparan (MDG-1) 2015 di Indonesia, dan (5) Merumuskan kebijakan strategis pemantapan ketahanan pangan dan percepatan pencapaian target MDG-1 2015 di Indonesia.

DAMPAK DAN RESPON KEBIJAKAN GLOBAL KRISIS PANGAN, ENERGI, DAN FINANSIAL

Dampak dan Kebijakan Produksi Pangan

Dampak krisis PEF terhadap produksi pangan global sedikitnya terkait dengan empat faktor yaitu pengembangan bioenergi, volatilitas harga pangan,

investasi dan bantuan negara maju, dan eksistensi usahatani skala kecil. Krisis PEF berdampak langsung terhadap realokasi sumberdaya lahan dan pangan untuk bioenergi yang pada akhirnya berdampak terhadap stabilitas harga pangan. Krisis juga berdampak terhadap ketersediaan dan alokasi dana pembangunan sektor pertanian, dan bersamaan dengan volatilitas harga berdampak pada pengembangan kapasitas dan keberlanjutan usahatani bagi petani skala kecil di negara berkembang. Kesemuanya itu akhirnya akan berdampak terhadap produksi dan pasokan pangan regional dan global.

Dampak krisis PEF terhadap produksi biji-bijian pangan regional/global pada Tabel 1 memberikan informasi menarik sebagai berikut: (a) Secara akumulatif krisis PEF 2007-2008 berdampak terhadap penurunan produksi biji-bijian global sebesar 2,1 persen, dan di negara defisit pangan berpendapatan rendah (LIFDC's) sebesar 0,6 persen; (b) Dampak krisis sebesar 0,6 persen di LIFDC's terutama disebabkan oleh penurunan produksi biji-bijian di India sebesar 7,7 persen dan di China sebesar 0,8 persen; (c) Perbedaan pertumbuhan 2007-2008 antara produksi dunia vs LIFDC's merefleksikan perbedaan pertumbuhan antara negara maju dengan negara berkembang secara keseluruhan. Menurut Von Braun (2008) dalam periode 2007-2008 pertumbuhan produksi pangan (biji-bijian) di negara berkembang hanya 0,9 persen, sementara di negara maju mencapai 11,0 persen.

Tabel 1. Dampak Krisis PEF terhadap Pertumbuhan Produksi Pangan Regional dan Global, 2005-2009

No.	Uraian	Pertumbuhan 1999-2008 (%/tahun)	Pertumbuhan Terhadap Tahun Sebelumnya (%)				
			2005	2006	2007	2008	2009
1.	Produksi Dunia	2,1	-1,0	-1,6	6,2	6,2	-2,1
2.	Produksi LIFDC's1)	1,7	5,1	4,4	2,3	3,8	-0,6
3.	Produksi LIFDC's (Less China + India)	3,2	6,7	4,3	-0,5	4,5	4,5

1) Penurunan produksi di China dan India 2009 (relatif terhadap 2008) mencapai 0,8 % dan 7,7%

Sumber : <http://www.fao.org/docref/012/ak340e/ak340e07.htm>. (18 November 2009)

Seminar terkait dengan pengembangan bioenergi, Agricultural Outlook 2007, 19 Juni 2007 di Tokyo memberikan beberapa informasi menarik (Sugino, 2007) Pada tahun 2016 diproyeksikan 60 persen produksi jagung di Brazilia dan lebih dari 50 persen produksi *oilseed* di MEE akan dialokasikan untuk produksi bioenergi, biodiesel, dan bioethanol. Diakui bahwa perkembangan industri bioenergi kedepan akan sangat tergantung pada perkembangan harga bahan baku utama (*feedstock*), harga minyak (*fossilfuel*), teknologi, dan kebijakan pemerintah. Dapat diantisipasi bahwa satu dasa warsa mendatang produksi bioenergi berbasis biji-bijian akan berkembang pesat dengan konsekwensi kebutuhan jagung dan gandum yang tinggi. Implikasi dari kecenderungan ini adalah akan terjadi

penurunan ekspor dan ketersediaan jagung dan gandum di pasar dunia, peningkatan harga pangan, dan realokasi sumberdaya lahan. Pada saat bersamaan hasil proyeksi USDA, ekspor jagung Amerika Serikat tahun 2015 akan stagnan pada level 20 persen total produksi, sehingga tidak akan berdampak positif terhadap pasokan pasar dunia.

Kebijakan strategis pengembangan bioenergi dalam perspektif pemantapan ketahanan pangan dan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan mencakup beberapa aspek (PECC, 2006; Siregar dan Thompson, 2007; FAO, 2007) sebagai berikut: (a) Komitmen kebijakan (insentif pajak; R&D), strategi spesifik daerah, tukar-menukar teknologi antarnegara; (b) Daerah pengembangan baru melalui pendekatan total produktivitas pertanian secara berkelanjutan; (c) Pengembangan bioenergi harus mampu menghindari kompetisi pemanfaatan lahan dan air untuk pangan, dan mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat rawan pangan.

Dalam periode 1980-2002, bantuan luar negeri (ODA/Overseas Development Assistance) negara maju meningkat sebesar 65 persen dari USD 37,1 milyar menjadi 61,4 milyar. Dalam periode yang sama ODA untuk sektor pertanian secara nominal menurun secara tajam dari USD 6,2 milyar menjadi hanya 2,3 milyar, atau secara relatif menurun dari 17,0 persen menjadi 3,7 persen terhadap total ODA. Secara geographis penurunan terbesar terjadi di kawasan Asia. Bantuan sektor pertanian di Asia Tengah dan Selatan menurun sebesar 83 persen selama perioda 1980-2002 (OECD, 2006 *dalam* Amewoa, 2008). Krisis finansial disamping berdampak terhadap ketersediaan dana investasi, juga berdampak terhadap volatilitas dan penurunan harga yang pada akhirnya mengurangi insentif bagi petani untuk mengembangkan dan menjaga keberlanjutan usahatani.

Peningkatan produksi pangan di negara berkembang sangat ditentukan oleh eksistensi dan kebijakan strategis terkait dengan peningkatan peran rumah tangga petani skala kecil. Di negara berkembang tidak kurang dari 500 juta rumah tangga (sekitar 1,5 milyar orang) tergantung pada usahatani skala kecil dengan skala usaha kurang dari 2,0 hektar (Hazell *et al.*, 2007; Evans, 2009). Dalam konteks pertumbuhan dan pemerataan (*growth and equity*), kebijakan strategis pengembangan usahatani skala kecil mencakup tiga aspek penting (Hazell *et al.*, 2007; ID21, 2008) yaitu: (a) Pemantapan stabilitas makroekonomi dan anggaran pembangunan pertanian dan infrastruktur perdesaan; (b) Mendorong pengembangan usahatani berbasis pasar dan perbaikan sistem pemasaran produk pertanian untuk mencapai pangsa pasar yang lebih tinggi; dan (c) Inisiasi dan pengembangan inovasi kelembagaan untuk menjamin ketersediaan input dan pelayanan bagi kepentingan petani kecil. Secara empirik, keberhasilan pengembangan petani kecil di Vietnam, patut menjadi acuan. Di negeri ini, petani kecil mampu memetik manfaat dari peningkatan harga komoditas melalui akses pasar ekspor dan memanfaatkan pertumbuhan ekonomi domestik yang tinggi (Evans, 2009)

Dampak dan Kebijakan Ketersediaan/Perdagangan Pangan

Ketersediaan pangan dalam suatu negara akan ditentukan oleh kemampuan produksi dalam negeri dan kebijakan perdagangan pangan domestik dan global. Kebijakan perdagangan mencakup kebijakan produksi, cadangan pangan, ekspor-impor, dan lain-lain. Kebijakan perdagangan pangan negara maju yang memiliki surplus pangan akan berpengaruh terhadap ketersediaan pangan dinegara berkembang. Ketersediaan pangan ini akan berpengaruh terhadap harga dan akses pangan yang pada akhirnya akan berdampak terhadap ketahanan pangan dan kemiskinan.

Dampak krisis PEF terhadap tingkat ketersediaan atau kelangkaan pangan global direfleksikan oleh perkembangan indeks harga pangan pada Tabel 2 dan Gambar 1. Krisis PEF secara konsisten berdampak terhadap peningkatan indeks harga gandum, jagung, dan beras pada tahun 2007 dan 2008, dan selanjutnya diikuti oleh penurunan pada tahun 2009 (Tabel 2). Walaupun terjadi penurunan indeks harga ketiga komoditas tahun 2009, indeks harga pangan tahun 2009 tetap lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelum krisis (2005 dan 2006) (Gambar 1). Kinerja indeks harga pangan 2009, dimungkinkan karena adanya penurunan indeks harga biji-bijian, daging, dan produk susu, sementara indeks harga minyak nabati/lemak dan terutama gula mengalami peningkatan.

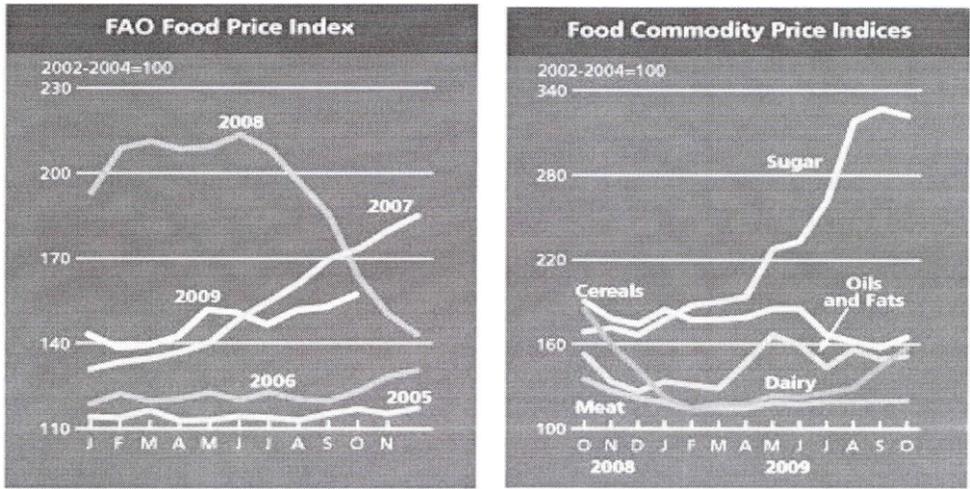
Tabel 2. Dampak Krisis PEF terhadap Pertumbuhan Indeks Harga Pangan Global, 2005-2009

No.	Uraian	Rataan Indeks (2002-2006)	Pertumbuhan Terhadap Tahun Sebelumnya (%)				
			2005	2006	2007	2008	2009
1.	Gandum	104,6	-1,4	17,1	49,1	31,5	-40,2
2.	Jagung	101,7	-12,1	23,3	34,1	36,5	-31,5
3.	Beras	112,3	5,7	9,9	17,3	83,7	-14,6

Sumber : <http://www.fao.org/docref/012/ak340e/ak340e07.htm>. (18 November 2009)

Keluar dari krisis pangan global saat ini, membutuhkan reorientasi arah pembangunan dan perdagangan komoditas pangan. Solusi tradisional dengan fokus industrialisasi pertanian dan liberalisasi perdagangan dan investasi dinilai tidak kontekstual dan relevan. Dibutuhkan reorientasi dengan fokus pada gerakan sosial dan pemberdayaan petani kecil yang memegang peranan sentral dalam produksi dan ketersediaan pangan, khususnya di negara sedang berkembang (GRAIN, 2008). Terdapat tiga isu pokok yang perlu dipecahkan untuk keluar dari krisis pangan yaitu ketersediaan/akses lahan, pasar, dan eksistensi petani skala kecil. Puluhan tahun pelaksanaan liberalisasi perdagangan telah merusak tatanan sistem tarififikasi yang dibutuhkan untuk melindungi produksi pertanian negara

berkembang, dengan konsekwensi peningkatan ketergantungan impor pangan bagi negara-negara miskin. Perspektif usahatani ke depan perlu diarahkan ke usahatani produktif, tidak tergantung pada energi fosil, dan dalam kendali petani kecil. Pemerintah perlu meningkatkan potensi dan kapasitas pertanian skala kecil yang ternyata mampu mendukung keberlanjutan usahatani dan produksi pangan



Gambar 1. Dampak Krisis PEF terhadap Indeks Harga Pangan dan Komoditas Global, 2005-2009

Sumber: http://www.fao.org/world_food_situatiofl/food_priece_index/en (18 November, 2009)

Kebijakan antisipatif perdagangan ke depan yang perlu dipertimbangkan untuk menanggulangi dampak krisis pangan-energi-finansial, diantaranya adalah (Von Braun and Torero, 2009; ADB,2008; Constantin, 2008) (a) Cadangan pangan dengan volume yang rasional untuk mengatasi atau merespon secara wajar kemungkinan adanya krisis pangan; (b) Pengembangan "*innovative virtual reserve*" untuk mencegah peningkatan harga yang tidak terkendali dan tetap mempertahankan harga pangan jangka panjang pada tingkat harga paritas yang mengindikasikan kekuatan penawaran dan permintaan; (c) Sistem cadangan pangan "*virtual*" harus dalam posisi untuk mampu mencegah terjadinya intervensi kebijakan perdagangan yang membahayakan, seperti larangan ekspor, tarif ekspor tinggi, dan subsidi impor yang tinggi; (d) Dalam perspektif menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi di kawasan Asia perlu dimantapkan kerjasama regional dengan mempertimbangkan integrasi produksi, pasar finansial, pengelolaan sumberdaya, dan pemantapan realisasi pertumbuhan inklusif serta berkelanjutan; dan (e) Harmonisasi kebijakan pertanian dan perdagangan dengan keberpihakan pada petani miskin di wilayah marginal, disamping penanganan instabilitas harga pangan secara terkoordinasi diantara negara produsen pangan.

Dampak dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Beberapa informasi terkait dengan dampak krisis PEF terhadap kemiskinan diantaranya adalah: (a) Krisis pangan 2007 berdampak terhadap peningkatan penduduk rawan pangan (*undernourished people*) dari 848 juta (2003-2005) menjadi 923 juta tahun 2007 (FAO dalam Von Braun, 2008). Pada tahun 2008 penduduk rawan pangan diperkirakan meningkat lebih besar dari 3,0 persen menjadi lebih dari 950 juta, sebagai akibat berlanjutnya peningkatan harga pangan dan terjadinya krisis finansial global; (b) Disamping krisis PEF, menurut Intergovernmental Panel on Climate Change, perubahan iklim akan meningkatkan populasi penduduk rawan pangan global sekitar 105 juta (Evans, 2009); (c) PBB memperkirakan tidak kurang dari satu milyar penduduk dunia yang mengalami rawan pangan sebagai konsekwensi dari krisis pangan global, sebagian besar di Asia (62,0%), dan sekitar 80 persen adalah petani dan buruh tani (GRAIN, 2009); (d) Disamping peningkatan penduduk rawan pangan, peningkatan harga pangan global telah menambah jumlah penduduk miskin sekitar 110 juta; (e) Berdasarkan dampak jangka pendek peningkatan harga pangan terhadap kemiskinan sebesar 45 persen, diperkirakan peningkatan jumlah penduduk miskin di negara berkembang berpendapatan rendah sebesar 105 juta orang (Ivanic and Martin, 2008)

Dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan penduduk rawan pangan sebagai akibat krisis PEF mencapai sekitar 100 juta, dan sebagai akibat perubahan iklim global mencapai 105 juta, dimana secara akumulatif jumlahnya pada tahun 2008/2009 mencapai sekitar 1,0 milyar orang. Dampak krisis PEF terhadap kemiskinan diyakini lebih dari 110 juta orang, karena dampaknya di negara berkembang berpendapatan rendah saja mencapai 105 juta orang. Dengan asumsi 65 persen kemiskinan ada di negara berkembang, maka dampak krisis pangan terhadap kemiskinan global diperkirakan tidak kurang dari 160 juta orang

Kebijakan penanggulangan kemiskinan regional/global terkait dengan dampak krisis PEF, tidak terlepas dari pemantapan ketahanan pangan, dimana sebagian besar kelompok miskin mengandalkan sumber pendapatan utama dari sektor pertanian. Menurut Nellemann *et al.* (2009) terdapat tujuh opsi kebijakan pemantapan ketahanan pangan, yang pada hakekatnya secara implisit terkait langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan. Dua opsi kebijakan jangka pendek mencakup: (a) Regulasi harga pangan dan implementasi jaring pengaman sosial bagi kelompok miskin; dan (b) Pengembangan bioenergi berkelanjutan dan ramah lingkungan yang tidak berkompetisi dalam pemanfaatan lahan dan air bagi pengembangan komoditas pangan. Tiga opsi jangka menengah adalah: (a) Realokasi pemanfaatan biji-bijian untuk pakan kepada kebutuhan pangan, melalui pengembangan teknologi pakan alternatif dengan pemanfaatan limbah pertanian; (b) Dukungan terhadap petani skala kecil melalui dukungan pendanaan keuangan mikro dalam pengembangan pola usahatani berkelanjutan dan ramah lingkungan; (c) Peningkatan perdagangan dan akses pasar melalui perbaikan infrastruktur, mengurangi hambatan perdagangan, pemantapan program subsidi dan jaring

pengaman sosial, dan sistem pemerintahan demokratis yang kuat dan efektif. Terakhir adalah dua opsi kebijakan jangka panjang, yang mencakup: (a) Pengendalian dampak pemanasan global melalui upaya adaptasi dan mitigasi; dan (b) Meningkatkan kesadaran tentang dampak peningkatan jumlah penduduk dan pola konsumsi terhadap lingkungan ekosistem.

DAMPAK DAN RESPONS KRISIS PEF TERHADAP KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Produksi Pangan Utama Nasional

Dampak krisis PEF terhadap produksi pangan di Indonesia menunjukkan keragaan yang tidak searah dengan kondisi di tataran global/regional. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan produksi yang positif pada tanaman pangan utama di Indonesia yaitu padi, jagung dan kedelai. Secara nasional pada tahun 2007-2008 pertumbuhan produksi ketiga komoditas tersebut arahnya positif dan cenderung lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan untuk pertumbuhan produksi jagung dan kedelai cenderung spektakuler dibanding periode sebelumnya (Tabel 3). Peningkatan luas areal panen padi di Luar Jawa memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan produksi padi nasional dengan pertumbuhan 6,47 persen pada selang waktu tahun 2006-2007 (Saliem, 2008)

Tabel 3. Dampak Krisis terhadap Produksi Pangan Utama Indonesia, 1990-2008

No.	Komoditas	Pertumbuhan (%/tahun)			
		1990-1999	1990-2008	2000-2008	2007-2008
1.	Padi	1,16	1,68	2,58	5,26
2.	Jagung	4,85	6,29	6,29	21,13
3.	Kedelai	-2,25	-2,62	-2,62	26,87
4.	Ubikayu	-0,40	3,35	3,35	7,75
5.	Ubijalar	-1,47	-0,78	0,90	-0,53

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 1990-2009, Jakarta (diolah)

Selain perluasan areal panen di Luar Jawa, berbagai program insentif dan fokus kegiatan pada komoditas unggulan yang dilaksanakan dalam periode 2-3 tahun terakhir diduga memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi pangan di Indonesia. Di antara berbagai program insentif yang dilaksanakan pemerintah melalui Departemen Pertanian antara lain adalah BLBU (bantuan langsung benih unggul), penataan sistem distribusi pupuk, subsidi bunga bank, dan percepatan inovasi dan diseminasi teknologi pertanian untuk mendukung program peningkatan produksi beras nasional (P2BN) melalui SLPTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu) pada padi, diikuti SLPTT jagung dan kedelai terbukti mampu meningkatkan produksi pangan nasional secara signifikan.

Melalui dukungan program yang tepat walaupun rataan skala penguasaan lahan usahatani tanaman pangan relatif sempit (dibanding kondisi negara maju), ternyata Indonesia mampu meredam dampak negatif krisis PEF terhadap produksi pangan nasional.

Berbeda dengan kinerja produksi padi, jagung dan kedelai, laju peningkatan produksi ubi kayu cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan ubi jalar justru menunjukkan pertumbuhan produksi yang negatif. Kompetisi dalam pemanfaatan lahan diduga merupakan faktor utama dalam memacu pertumbuhan produksi padi dan palawija di Indonesia, artinya peningkatan produksi padi, jagung, kedelai dan ubi kayu dapat menekan produksi ubi jalar dan atau palawija lainnya apabila tidak ada perluasan lahan pertanian. Selain itu, peningkatan produksi ubi kayu diduga juga didorong oleh adanya peningkatan permintaan untuk pemanfaatan bahan baku produksi ethanol/bio-diesel.

Arah pertumbuhan yang positif pada peningkatan produksi pada periode 2007-2008 juga terlihat pada komoditas gula, daging, telur dan susu (Tabel 4). Pencanangan program swasembada gula tahun 2010 dan swasembada daging tahun 2011 sudah mengarah pada peningkatan produksi yang cukup signifikan selama periode dua tahun terakhir. Ke depan, apabila dukungan terhadap pencapaian swasembada gula dan daging mampu dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan Indonesia dapat meredam dampak negatif dari krisis PEF terhadap produksi pangan nasional khususnya pada komoditas tebu (gula), daging, telur dan susu.

Tabel 4. Dampak Krisis terhadap Produksi Gula, Daging, Telur dan Susu di Indonesia, 1990-2008

No.	Komoditas	Pertumbuhan (%/tahun)			
		1990-1999	1990-2008	2000-2008	2007-2008
1.	Gula	-3,68	2,70	13,95	18,00
2.	Daging	2,39	1,04	-2,28	74,10
3.	Telur	3,25	2,34	-2,80	9,20
4.	Ubijalar	2,07	3,41	4,16	5,20

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 1990-2009, Jakarta (diolah)

Fenomena dampak krisis PEF tahun 2007-2008 bagi produksi pangan di Indonesia serupa dengan kondisi saat terjadi krisis ekonomi tahun 1997-1998. Kasryno (2000) melaporkan bahwa pada tahun 1997-1998 pertumbuhan sektor pertanian masih positif, padahal secara makro perekonomian nasional Indonesia mengalami kontraksi yang cukup besar. Krisis ekonomi menumbuhkan keyakinan bahwa sektor pertanian dapat berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut Kasryno (2000) menambahkan bahwa krisis

ekonomi tahun 1997 memberi pelajaran perlunya melakukan koreksi terhadap kebijakan pembangunan nasional dengan memprioritaskan pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya manusia secara optimal, berkeadilan serta menjadikan sektor pertanian yang modern dengan *broad based diversification* sebagai basis pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketersediaan dan Konsumsi Pangan

Kinerja ketersediaan pangan nasional menunjukkan perkembangan yang kurang menggembarakan, kecuali untuk komoditas beras (Tabel 5). Dalam upaya mengimbangi kebutuhan permintaan pangan domestik, pemerintah mengambil kebijakan impor untuk komoditas yang ketersediaannya tidak dapat dipenuhi dari domestik. Kebijakan impor membutuhkan pengeluaran devisa negara yang semakin besar searah dengan makin meningkatnya permintaan sebagai konsekuensi peningkatan jumlah penduduk. Meningkatnya pemenuhan ketersediaan pangan yang berasal dari impor dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap optimalisasi pemanfaatan sumberdaya domestik. Mengingat potensi sumberdaya domestik yang ada, maka kebijakan pengembangan pangan dan produk turunannya berbasis sumberdaya lokal dalam kerangka diversifikasi konsumsi pangan perlu mendapat prioritas.

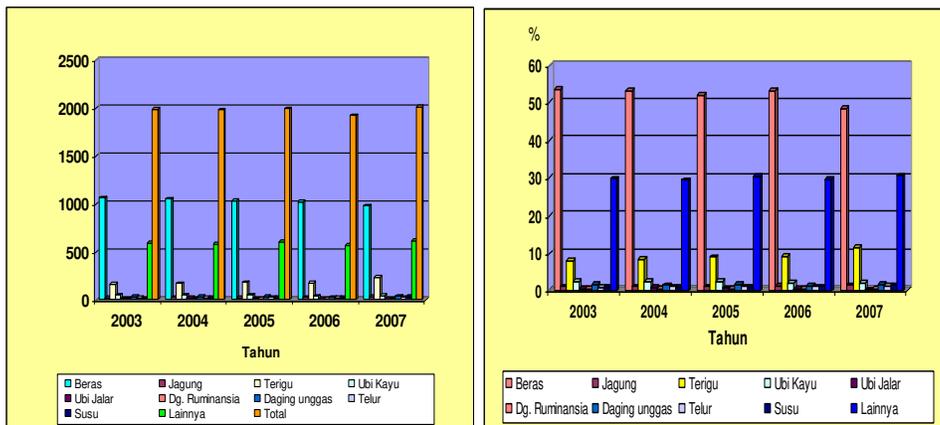
Tabel 5. Dampak Krisis PEF terhadap Laju Ketersediaan Pangan Utama di Indonesia, 1990-2007

Periode	Pertumbuhan (%/tahun)							
	Beras	Jagung	Kedelai	Gula	Daging Sapi	Daging Unggas	Telur	Susu
1990-2003	0,94	2,68	-2,59	0,75	1,5	2,7	4,76	4,45
1990-1999	2,2	3,96	-6,4	1,6	2,57	2,04	3,33	3,95
2000-2003	0,42	4,01	-5,73	-3,29	-1,98	6,21	8,28	3,88
1990-2007	0,89	0	0	-0,02	0	0,62	0,15	0,19
2000-2007	1,58	-0,01	0	0,06	0	0,31	0,13	0,18

Sumber : BPS. Neraca Bahan Makanan, 1990-2007, Jakarta (diolah)

Instrumen kebijakan yang terkait dengan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal telah diundangkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Justifikasi dikeluarkannya kebijakan tersebut antara lain adalah adanya fakta bahwa selama ini mutu keanekaragaman pangan kita masih amat rendah, tingginya kesenjangan mutu gizi masyarakat, penurunan proporsi sumber daya pangan berbasis lokal dan lambatnya aplikasi teknologi.

Gambar 2 menunjukkan bahwa perkembangan konsumsi pangan yang diukur dengan rataan konsumsi energi rumah tangga secara konsisten menunjukkan peningkatan antar waktu, bahkan secara rata-rata konsumsi energi pada tahun 2007 telah melebihi standar rekomendasi (2000 versus 215 Kkal/kapita/hari) Apabila dicermati komposisi sumber energinya, energi yang berasal dari pangan sumber karbohidrat terutama beras masih dominan, namun demikian ada penurunan konsumsi antar waktu yang mengarah pada rekomendasi Pola Pangan Harapan (PPH). Di lain pihak, konsumsi energi yang berasal dari terigu secara absolut maupun persentase meningkat secara signifikan. Mengingat produk terigu berasal dari gandum yang kurang sesuai untuk diproduksi di dalam negeri, maka perlu penegasan komitmen semua pihak untuk mendorong terlaksananya percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Perpres No 22 tahun 2009 perlu dijabarkan secara lebih operasional di tataran provinsi, kabupaten, desa bahkan sampai di tingkat rumah tangga.



Gambar 2. Perkembangan Konsumsi Energi menurut Jenis Pangan Utama di Indonesia, 2003-2007

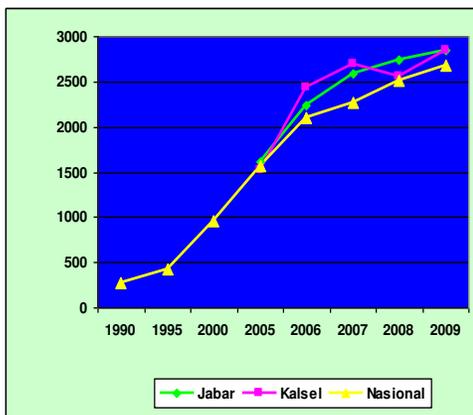
Sumber: BPS, Neraca Bahan Makanan, berbagai tahun (diolah)

Penelitian di level mikro yang dilakukan oleh Harianto *et al.* (2008), menunjukkan bahwa dampak krisis ekonomi yang terjadi tahun 2007 dan diawali dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tahun 2005 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap frekuensi makan rata-rata rumah tangga di agroekosistem sawah, lahan kering tanaman pangan/hortikultura maupun lahan kering tanaman perkebunan, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Bahkan pada rumah tangga di agroekosistem lahan kering tanaman pangan/hortikultura sama sekali tidak merubah frekuensi konsumsi makan. Namun demikian, sebagian kecil rumah tangga di semua agroekosistem baik di Jawa maupun di luar Jawa melakukan penurunan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan pokok.

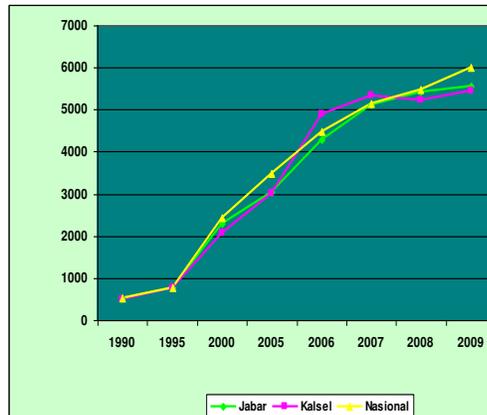
Perkembangan dan Stabilitas Harga Pangan

Dalam satu dekade terakhir, harga komoditas pangan di tingkat konsumen, produsen maupun di tingkat perdagangan besar cenderung meningkat, dengan koefisien keragaman yang cukup tinggi. Harga-harga komoditas pangan pada era desentralisasi (2002-2004) lebih stabil dibandingkan dengan periode 1990-1999. Kestabilan harga disebabkan keberhasilan beberapa kebijakan pemerintah pada era desentralisasi (Saliem *et al.*, 2008).

Perkembangan harga gabah dan beras yang disajikan pada Gambar 3 dan Gambar 4 memberikan informasi bahwa sejak tahun 2005 harga gabah maupun beras meningkat cukup signifikan. Namun demikian tingkat harga gabah yang mencerminkan harga di tingkat petani/produsen, di level nasional relatif lebih tinggi dari pada rata-rata di Provinsi Jawa Barat dan Kalimantan Selatan. Untuk harga beras, sejak 2008 rata-rata harga di tingkat nasional lebih tinggi dari dua provinsi sentra produksi pangan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya fluktuasi harga beras dalam dimensi waktu dan spasial.



Gambar 3. Perkembangan Harga Gabah (GKP) di Tingkat Produsen, 1990-2009



Gambar 4. Perkembangan Harga Beras Premium, 1990-2009

Dalam upaya mengamankan harga beras dan melindungi petani padi dalam negeri, Indonesia telah menerapkan tarif impor sejak tahun 2000 sebesar Rp 430,-/kg. Penetapan besaran tarif tersebut masih lebih rendah dari kesepakatan yang ditetapkan oleh WTO. Analisis yang dilakukan oleh Susilowati (2008) menunjukkan bahwa penerapan tarif berdampak signifikan terhadap penurunan volume impor beras Indonesia. Dalam upaya menjaga stabilisasi harga beras, Indonesia juga menerapkan kebijakan penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah maupun beras yang besarnya dievaluasi secara berkala.

KINERJA DAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN TARGET MDG-1 INDONESIA 2015

Konsep Millenium Development Goal (MDG) pada intinya bertujuan untuk membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi semua pihak. Kerangka MDG disusun untuk menyamakan visi global yang selanjutnya diterjemahkan pada aksi-aksi pembangunan lokal. Bagi Indonesia, sebagian besar persoalan yang tercakup dalam MDG bukan merupakan persoalan yang baru. Isu kemiskinan, pendidikan dan kesehatan telah menjadi target utama pemerintah sejak lama. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia menyambut baik komitmen yang dibuat dengan Deklarasi Millenium PBB yang secara langsung menyatakan komitmen global untuk mengatasi persoalan-persoalan utama kemanusiaan. Dari 8 tujuan utama MDG-1 tersebut, tujuan pertama yaitu pengentasan kemiskinan dan kelaparan menjadi isu sentral bagi pemerintah Indonesia untuk mendapat penanganan serius.

Pencapaian Target Pengentasan Kemiskinan

Berdasarkan data tahun dasar 1990, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai angka 27,20 juta orang atau sekitar 15,08 persen dari total penduduk (Tabel 6). Selama periode 1990-1995, proporsi penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 5,01 persen per tahun. Akibat krisis ekonomi tahun 1997, terjadi kenaikan proporsi penduduk miskin dari 17,47 (1996) persen menjadi 24,23 persen (1998). Pada tahun 1999, kondisi perekonomian mulai membaik dan persentase penduduk miskin turun menjadi 23,43 persen. Pada periode 1998-2000 penurunan kemiskinan relatif signifikan (11,43%) dan kemudian mengalami perlambatan penurunan pada periode 2000-2009 menjadi -2,21 persen.

Faktor yang diduga menjadi penyebab utama terjadinya perlambatan penurunan kemiskinan selama periode 2000-2009 adalah naiknya BBM tahun 2005 yang mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2006 menjadi 39,30 juta dari 35,10 juta tahun 2005. Dibutuhkan waktu sekitar satu tahun agar kemiskinan mengalami penurunan kembali pada tahun 2007 yaitu 37,17 juta (16,60%). Dengan mengacu trend penurunan kemiskinan 2000-2009 dan dengan asumsi perekonomian nasional akan berjalan cukup stabil pada 6 tahun mendatang, diperkirakan tingkat kemiskinan relatif tahun 2015 akan mencapai 12,28 persen. Angka ini nampaknya masih jauh dari target penurunan kemiskinan menjadi 7,50 persen (MDG-1), sehingga dibutuhkan komitmen dan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak.

Pencapaian target MDG-1 sangat ditentukan oleh tingkat garis kemiskinan yang digunakan. Dengan mengacu standar internasional (USD 1,0 per hari), menurut Bappenas dan UNDP (2008), pada tahun 2007 proporsi penduduk miskin mencapai 7,5 persen atau sudah melampaui target. Namun jika menggunakan

kriteria USD 2.0 per hari, akan diperoleh hasil yang sangat berbeda. Pada tahun 2007 tingkat kemiskinan sebesar 49 persen, atau masih jauh dari target 2015 (Tabel 7). Dari analisis yang dilakukan lembaga tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah berhasil mengatasi kemiskinan ekstrim, tetapi masih membutuhkan upaya yang keras dan sungguh-sungguh untuk mengatasi kemiskinan moderat (versi BPS dan standar USD 2,0 per hari).

Tabel 6. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Desa dan Kota) di Indonesia, 1990-2009

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Indonesia	Kota	Desa	Indonesia
1990	9,40	17,80	27,20	16,75	14,33	15,08
2000	12,30	26,40	38,70	14,60	22,38	19,14
2001	8,60	29,30	37,90	9,76	24,84	18,41
2002	13,30	25,10	38,40	14,46	21,10	18,20
2003	12,20	25,10	37,30	13,57	20,23	17,42
2004	11,40	24,80	36,20	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,70	20,00	15,97
2006	14,49	24,80	39,30	13,50	21,80	17,80
2007	13,50	23,61	37,17	12,51	20,40	16,60
2008 ¹⁾	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42
2009 ¹⁾	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15
Perkembangan (%/tahun)						
1990-1995	-4,68	-2,80	-3,45	-8,42	-2,83	-5,01
1995-1998	45,59	34,68	28,21	40,72	34,83	36,59
1998-2000	-17,46	-9,11	-11,90	-19,63	-6,76	-11,43
2000-2009	2,60	-2,51	-0,79	-0,99	-2,09	-2,21

Sumber : Badan Pusat Statistik, Jakarta (diolah).

¹⁾ Keterangan : Kondisi per Maret pada tahun bersangkutan

Tabel 7. Tingkat Kemiskinan 2007/2009 dan Target MDG-1 2015 di Indonesia

Kriteria kemiskinan	Tahun Dasar = 1990	2007	Target 2015	Status
USD 1,0	20,6 %	7,5 %	10,3 %	Telah tercapai
Nasional/BPS ¹⁾	15,1 %	16,6%	7,5 %	Perlu kerja keras
USD 2,0	71,0 %	49 %	35,5 %	Perlu kerja keras

¹⁾ Tingkat kemiskinan 2009 adalah 14,15%. Berdasarkan laju penurunan kemiskinan 2,2%/tahun (2000-2009), maka proyeksi kemiskinan 2015 adalah 12,3%.

Sumber: Bappenas dan UNDP (2008)

Faktor Penghambat Pengentasan Kemiskinan

Indikator penting penghambat pengentasan kemiskinan yang perlu mendapat perhatian adalah disparitas spasial kemiskinan. Proporsi penyebaran

penduduk miskin selama 2000-2007 tidak mengalami perubahan dan tetap terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan proporsi sekitar 57,5 persen (Tabel 8). Proporsi ini nampaknya linear dengan jumlah penduduk yang menghuni di pulau tersebut. Implikasinya adalah dibutuhkan pola penanganan kemiskinan yang optimal dengan memberikan prioritas pada Pulau Jawa sebagai daerah basis penduduk miskin terbesar (secara absolut), tanpa mengabaikan kawasan timur Indonesia. Pada kawasan timur seperti Papua, tingkat kemiskinan (relatif) sangat tinggi, dimana hampir separuh penduduk berada di bawah garis kemiskinan.

Tabel 8. Proporsi Jumlah Penduduk Miskin menurut Pulau di Indonesia, 2000-2007 (%)

Pulau	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2007	Rata-Rata
Sumatera	18,5	18,4	21,8	21,8	21,8	20,00	21,10	20,75
Jawa	58,0	59,0	56,4	56,9	56,7	57,8	56,75	57,12
Bali + Nusa Tenggara	6,9	7,2	6,7	6,6	6,7	6,8	6,76	6,78
Kalimantan	5,4	4,4	3,8	3,7	3,6	4,2	3,64	3,92
Sulawesi	6,4	7,3	7,4	7,2	7,2	7,0	7,50	7,30
Maluku + Papua	4,8	3,8	3,9	3,8	4,1	4,2	4,24	4,17
INDONESIA	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, Jakarta (diolah)

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman kemiskinan (P_1) dan keparahan kemiskinan (P_2). Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan juga diharapkan mampu mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, tidak ada perubahan berarti dari kedua indikator kemiskinan tersebut. Perkembangannya bersifat fluktuatif dan stagnan, dengan laju penurunan yang sangat rendah, yaitu 0,40 persen/tahun (P_1) dan 0,29 persen/tahun untuk P_2 (Tabel 9). Kecenderungan ini mempersulit pencapaian target pengentasan kemiskinan 2015.

Upaya dan keberhasilan pengentasan kemiskinan akan sangat ditentukan oleh distribusi pendapatan. Pendapatan yang terdistribusi semakin baik antar wilayah (desa - kota) dan antar kelompok pendapatan akan lebih memungkinkan bagi kelompok miskin untuk meningkatkan kapasitas dan akses mereka terhadap kesempatan kerja dan sumber-sumber pendapatan. Distribusi pengeluaran ditingkat nasional menurut kelompok pendapatan selama 16 tahun terakhir (1990 - 2006), tidak mengalami perubahan yang berarti. Disparitas pendapatan bersifat stagnan dan berada pada posisi moderat dengan nilai Indeks Gini sekitar 0,33. Proporsi pengeluaran 40 persen penduduk dengan kategori pendapatan rendah

hanya 21,31 persen (1990) dan bersifat stagnan dengan nilai sedikit lebih rendah pada tahun 2006, yaitu 19,75 persen.

Tabel 9. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Indonesia, 1990-2009

Tahun	Indikator Kemiskinan	
	Indeks Kedalaman (P ₁)	Indeks Keparahan (P ₂)
1990	2,71	0,72
2000	3,51	1,02
2004	2,89	0,78
2008	2,77	0,76
2009	2,50	0,68
Rataan	2,81	0,77
Trend (%Tahun)	-0,40	-0,29

Sumber: Badan Pusat Statistik, Jakarta (diolah)

Disparitas pendapatan penduduk di daerah perdesaan dan perkotaan memberikan gambaran yang berbeda. Di perdesaan disparitas pendapatan relatif lebih rendah dibandingkan dengan di perkotaan, dengan nilai rata-rata Indeks Gini 0,25 versus 0,33. Perkembangan Indeks Gini bersifat stagnan selama periode 1990 - 2006, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Keadaan ini merefleksikan belum mantapnya pelaksanaan program pembangunan dengan keberpihakan pada kaum miskin, dengan sasaran penciptaan kesempatan ekonomi dan akses bagi semua pihak (*pro-poor inclusive growth*). Pengentasan kemiskinan spasial yang sebagian besar terkonsentrasi di perdesaan adalah terkait dengan ketimpangan pendapatan antar kota dan desa. Konsekuensinya adalah dibutuhkan percepatan transformasi struktural dengan fokus pembangunan pertanian dan perdesaan, tanpa mengabaikan pertumbuhan sektor perkotaan.

PENUTUP

Antisipasi kebijakan global dalam merespon dampak krisis PEF adalah pengembangan pertanian skala kecil dalam perspektif pertumbuhan dan pemerataan yang mencakup tiga aspek kebijakan sebagai berikut: (a) Pemantapan stabilitas makro ekonomi dan anggaran pembangunan sektor pertanian dan pengembangan infrastruktur perdesaan; (b) Pengembangan produksi berbasis potensi pasar yang dikomplemen dengan perbaikan sistem dan efisiensi pemasaran produk pertanian; dan (c) Pengembangan inovasi kelembagaan dan sistem insentif dalam mendukung ketersediaan dan akses sarana produksi utama dan jasa pelayanan pengembangan usahatani skala kecil.

Dalam jangka menengah pemerintah agar fokus pada pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas sektor pertanian, pemantapan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Program prioritas yang perlu dipertimbangkan adalah swasembada berkelanjutan, peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian, serta peningkatan efektivitas program pemberdayaan sektor pertanian dan program jaring pengaman sosial bagi kelompok miskin. Upaya tersebut, perlu dikomplemen dengan program jangka panjang yang mencakup program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, mencegah kerusakan kualitas sumberdaya alam, pengembangan bioenergi berkelanjutan tanpa mengganggu sasaran program ketahanan pangan, dan pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk

Kebijakan spesifik dalam rangka akselerasi pencapaian target MDG-1 adalah sebagai berikut: (a) Fokus pada pembangunan pertanian dan perdesaan yang didukung sektor lainnya, dan dikomplemen dengan efektivitas program pengentasan kemiskinan, (b) Eliminasi dampak negatif liberalisasi melalui minimisasi dampak transisi, dan sistem perdagangan berbasis regulasi, terbuka dan adil; (c) Pemantapan eksistensi dan urgensi sektor informal dan pengarusutamaan gender, serta pengakuan dan penguatan aspek legalitas dalam pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan; (d) Peningkatan kapasitas penduduk miskin melalui perbaikan pendidikan dan kesehatan, ditunjang dengan fasilitasi akses terhadap kesempatan ekonomi secara lebih luas, (e) Percepatan transformasi struktural dan pertumbuhan inklusif pembangunan pertanian dan perdesaan dengan sasaran konvergensi produktivitas sektor pertanian dan nonpertanian, serta (f) melanjutkan program *pro-poor* yang saat ini sedang dijalankan secara konsisten dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB. 2008. Emerging Asian Regionalisms: A Partnership for Shared Prosperity. [Http://www.aric.adb.org/](http://www.aric.adb.org/) (2008).
- Amewoa,A.K. 2008. More Aid for more Impact: is the Agricultural Sector Left Behind. CAPSA Flash, vol. 6(1), January 2008. UNESCAP-CAPSA,Bogor.
- Bappenas dan UNDP.2008. Kita Suarakan MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia. Cetakan kedua. Oktober 2008. Bappenas dan UNDP.
- CIGAR. 2008. The Biofuel Revolution:Boon or Bana for the Developing World's Poo?, [http://www.cigar.org/\(march](http://www.cigar.org/(march), 2008)
- Constantin,A.L. 2008. Turning High Prices into an Opportunity: What ia Needed? IATP, <http://www.iatp.org/> (April 2008).
- Evans, A. 2009. The feeding of the Nine Billion: Global Food Security for the 21st Century. WFP, <http://beta.wfp.org> (22January 2009).
- FAO. 2007. Bioenergy could Drive Rural Development: Expert Weigh Bio-Power Impact. [http://www.fao.org/newsroom/en/news/\(23](http://www.fao.org/newsroom/en/news/(23) April 2007).

- GRAIN. 2008. Getting out the Food Crisis. <http://www.grain.org/> (July, 2008).
- GRAIN. 2009. World Food Crisis: The Other Pandemic, <http://www.grain.org/> (9 April, 2009).
- Harianto, A. Fariyanti, H.P Saliem, E.Ariningsih, E. Suryani, S. Jahroh. 2008. Konsorsium Penelitian: Karakteristik Sosial Ekonomi Petani pada Berbagai Tipe Agroekosistem: Karakteristik dan Arah Perubahan Konsumsi dan Pengeluaran Rumah Tangga. Laporan Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dan Institut Pertanian Bogor.
- Hazell, P., C.Poulton, S. Wiggins and A. Darward. 2007. The Future of Small Farmer for Poverty Reduction and Growth. 2020 Discussion Paper No. 42, IFPRI, Washington, DC, USA.
- ID21, 2008. Can Small Farmers still Play a Role in Reducing Poverty. <http://www.id21.org/>(22January 2008).
- Ivanic,M. and W.Martin. 2008. Implication of Higher Global Food Prices for Poverty in Low-Income Countries. World Bank Policy Research Working Paper 4594, World Bank, <http://www.wdc.worldbank.org> (April,2008).
- Kasryno, F. 2000. Menempatkan Pertanian Sebagai Basis Ekonomi Indonesia: Memantapkan Ketahanan Pangan dan Mengurangi Kemiskinan. Prosiding WNPG VII. LIPI. Jakarta
- Napitupulu, T.A. 2008.Crisis and Agriculture: The Importance of a Long-term Perspective. CAPSA Flash, Vol. 6, No. 12, December 2008. UNESCAP – CAPSA, Bogor.
- Nellemenn, C., M. Macdevette and T. Manders. 2009. The Environmental Food Crisis: the Environmental Role in Averting Future Food Crisis. A UNEP Rapid Response Assessment. GRID Arendal, <http://www.grida.no/> (February,2009).
- PECC. 2006. The Future Role of Biofuels: Pacific Food System Outlook 2006-2007. Pacific Economic Cooperation Council, 2006.
- Saliem, H. P., Supriyati, E. M. Lokollo, dan K. S. Indraningsih. 2008. Food Security in the Era of Decentralization in Indonesia. Working Paper No 102. UN-CAPSA.
- Siregar, M. and G.Thompson. 2007. Potential Impact of Bioenergy Development on Food Security, CAPSA Flash, Vol 5 (10), October 2007. UNESCAP-CAPSA, Bogor
- Sugino,T. 2007. Increasing Biofuel Demand and its Impacts on Markets and Poverty: The Output of two Recent Seminar and the Biomass Project. Palawija News, Vol.24 (2), August 2007. UNESCAP-CAPSA, Bogor.
- Susilowati, Sri Hery. 2008. Impact of Trade Reform on Agricultural Production and Trade in Indonesian. Paper presented on APEC Seminar on Sharing Experiences of Structural Adjustment Policies in The Agricultural Sector. Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, Government of Australia, Sydney 12-14 March 2008.

Von Braun, J. and M.Torero. 2009. Implementing Physical and Virtual Food Reserve to Protect the Poor Prevent Market Failure. Policy Brief No. 010, IFPRI. <http://www.ifpri.org/february> 2009)

Von Braun,J. 2008. Food and Finacial Crisis: Implication for Agriculture and the Poor. Brief prepared for for the CGIAR Annual General Meeting, Maputo, Mozambique, December 2008. IFPRI, Washington,DC., USA.